



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DAFTAR INVETARISASI MASALAH (DIM)**

TANGGAL 17 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 17 April 2017.
P u k u l	: 14.00 WIB s.d 16.15 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 20 orang, Izin 2 orang dari 37 orang Anggota. - Menkumham beserta Jajaran - Perwakilan Kemendagri

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan DIM RUU.

II. PEMBAHASAN

1. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
 - a. Perlu adanya kesepakatan bersama Fraksi-Fraksi terkait dengan pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3,

- khususnya mengenai adanya usulan perubahan materi yang berasal dari DPD RI apakah akan diakomodir dalam pembahasan RUU ini.
- b. Selain usulan dari DPD RI, terdapat juga masukan dari beberapa Fraksi untuk mengubah substansi dari draft RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 yang telah disahkan sebagai RUU Usul DPR.
2. Tanggapan/pandangan dari Pemerintah terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
 - a. Sikap Pemerintah terhadap draft RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 adalah menyetujui seluruh substansi dari RUU tersebut karena Pemerintah bermaksud mengakomodasi kepentingan politik yang berkembang.
 - b. Pemerintah juga berpendapat bahwa RUU yang diusulkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja dari DPR khususnya di bidang legislasi melalui penguatan Badan Legislasi.
 - c. Terkait dengan penambahan pimpinan, Pemerintah mengikuti apa yang diinginkan oleh DPR, sehingga Pemerintah mengharapkan pembahasan RUU dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
 - d. Jumlah DIM yang disampaikan oleh Pemerintah sebanyak 75 DIM yang seluruhnya bersifat tetap.
 3. Tanggapan/pandangan Fraksi-Fraksi terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
 - a. Fraksi Hanura DPR RI mengusulkan agar usulan dari DPD RI dapat diakomodir dalam pembahasan RUU ini.
 - b. Fraksi PKB mengusulkan perubahan substansi mengenai jumlah Pimpinan yang akan disampaikan secara tertulis.
 - c. Pengclustering dalam pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 adalah menyelesaikan DIM yang tidak terdapat konflik interest seperti pasal-pasal mengenai penguatan Badan Legislasi dan juga Mahkamah Kehormatan Dewan.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang telah disetujui adalah DIM nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75.
2. DIM yang disetujui untuk masuk dalam Tim Perumus adalah DIM nomor 37 dan 45.

3. DIM yang masih dipending pembahasannya adalah DIM nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 53, 67, dan 68.
4. Rapat akan dilanjutkan pada hari Kamis, 20 April 2017.

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 17 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001